

Fantastis, Pemkot Bekasi Kumpulkan Rp12 Miliar dari Potongan TPP Guru P3K

BEKASI (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berhasil mengumpulkan dana Rp 12 miliar dari hasil pemotongan tunjangan pendapatan pengasilan (TPP) Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kota Bekasi. Jumlah tersebut merupakan akumulasi pemotongan TPP dari 800 guru P3K sebesar Rp 3 juta selama lima bulan.

"Jika dihitung Rp 3 juta x 800 (orang) x 5 bulan maka jumlahnya Rp 12 miliar. Wowww fantastis," kata perwakilan guru P3K Kota Bekasi, Maryani merespons statemen Penjabat (Pj) Sekda Kota Bekasi, Junaedi bahwa potongan TPP sudah berdasarkan kesepakatan di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/5).

Karena potongan tersebut tidak diatur dalam undang-undang (UU), Maryani pun mempertanyakan aliran uang yang berhasil dikumpulkan Pemkot Bekasi tersebut.

Dia menilai, jika pemotongan TPP tidak ada payung hukumnya maka uang itu diambil tanpa hak alias masuk unsur pidana korupsi.

"Bisa saja jika kita bertanya uang Rp 3 juta itu dikemana itu bisa kena KPK juga," kata Maryani. Pihaknya membantah jika pernah ada pembahasan dan kesepakatan pemotongan TPP guru P3K Kota Bekasi.

Sebelumnya, Pj Sekda Kota Bekasi, Junaedi mengatakan, pemotongan

TPP sudah melalui pembahasan untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara Pemkot Bekasi dan guru P3K. Maryani pun menekankan, pernyataan itu sungguh sesat. "Wah itu tidak bener," katanya menegaskan.

Maryani mengaku, heran mengapa Junaedi sebagai pejabat pemerintah berbiaya tidak berdasarkan fakta dan bertindak sesuai UU. Sekali lagi, ia mengingatkan, pemotongan TPP guru P3K Kota Bekasi menyalahi ketentuan.

"Kok lucu ya bahasanya hasil kesepakatan. Bukan berdasarkan undang-undang dan peraturan," katanya.

Maryani menilai, Pj Sekda Junaedi tidak memahami ketentuan aturan yang ada terkait tunjangan guru. Dia menjelaskan, keberadaan guru P3K Kota Bekasi bukan berdasarkan kesepakatan, melainkan berdasarkan kebutuhan pemerintah pusat.

"Jadi seolah-olah P3K itu adalah hasil kesepakatan," ucap Maryani.

Dia menilai, langkah Pj Sekda Junaedi yang menyebut, Pemkot Bekasi sedang membuat regulasi tersendiri dan terpisah terkait guru P3K jelas menyalahi kewenangan. Menurut Maryani, kebijakan Pemkot Bekasi bertentangan dengan UU Pendidikan.

"Saya kira Sekda tidak paham hierarki hukum. Masa mau buat peraturan di atas undang-undang?" katanya. ● yan

Pengaturan Jam Kerja di Jakarta Berpotensi Ganggu Aktivitas Ekonomi

JAKARTA (IM) - Pengaturan jam kerja untuk mengurangi kemacetan di Jakarta dinilai berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian Ibu Kota.

Hal itu dikatakan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakri. Menurut Firman, walaupun pekerja pabrik lebih banyak di luar Jakarta, tetapi ada beberapa anggota asiasinya yang berjualan retail di mal maupun toko di Ibu Kota.

Firman menjelaskan, jika karyawan toko masuk pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 15.00 WIB, aktivitas ekonomi di toko itu akan terganggu.

"Jadi kalau kemudian itu misalnya karyawan yang biasanya sampai di Jakarta jam 10.00 WIB, sekarang dia harus sampai jam 8.00 WIB, sedangkan jam 15.00 WIB harus pulang, apakah ini akan mengganggu aktivitas

ekonomi di retailnya," ujar Firman saat dikonfirmasi, Selasa (16/5).

"Hal itu kan harus dipertimbangkan juga ya," tambah dia.

Menurut dia, pengaturan jam kerja dapat mengubah jam operasional toko di Jakarta. Hal ini juga akan berdampak pada transaksi penjualan yang berubah.

"Kalau retail di Jakarta nantinya akan bergeser jam, kemudian waktu pulang lebih lama yang jam 10.00 WIB, itu kan akan memengaruhi pola konsumsi, pola transaksi itu harus dipikirkan juga ya," jelas Firman.

Sebelumnya, Dir Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan, pihaknya masih menggelar diskusi soal aturan jam kerja untuk mengatasi kemacetan. Pold Metro Jaya akan menggelar diskusi terakhir pekan depan bersama Pemprov DKI Jakarta. ● yan

KPU DKI Waspadai Ijazah Palsu Para Bacaleg di Pileg 2024

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI menggendeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi kemungkinan ijazah palsu milik bakal calon legislatif (bacaleg) pada Pemilu 2024.

"Bawaslu selalu mengawasi, mereka dari proses awal tahapan ini, selalu mengawasi," kata Komisiner KPU DKI Jakarta Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Nurdin, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/5).

Nurdin mengatakan pihaknya tengah memeriksa berkas pendaftaran bacaleg yang akan mempergunakan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Proses verifikasi berkas tersebut akan berjalan dari 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Jika dalam proses verifikasi KPU menemukan kejanggalan ber-

kas seperti ijazah ataupun surat identitas diduga palsu, pihaknya akan memverifikasi data tersebut ke dinas terkait.

"Kami juga akan klarifikasi ke dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan dan sebagainya. Kalau yang bersangkutan tidak terdaftar di Dinas Pendidikan, secara administrasi. Kita akan coret namanya," ucap dia.

Temuan itu akan diberikan kepada Bawaslu. Nantinya Bawaslu yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Sejauh ini, KPU DKI sudah menerima bacaleg DPRD DKI dari 18 partai dan 25 caleg DPD. Rata-rata partai mencalonkan bacaleg sebanyak 106 orang untuk bertaring mempergunakan kursi DPRD. Dengan banyaknya peserta pemilu, dia berharap proses verifikasi data yang dilakukan KPU bisa berjalan maksimal. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANT



BURSA KERJA UNTUK KURANGI PENGANGGURAN DI JAKARTA

Pencari kerja mencari informasi lowongan di salah satu stan Pameran Bursa Kerja 2023 di pusat perbelanjaan Thamrin City, Jakarta, Selasa (16/5). Pameran yang berlangsung hingga 17 Mei 2023 tersebut diikuti 40 perusahaan dengan menawarkan berbagai lowongan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Jakarta yang mencapai 410.585 jiwa sesuai data BPS akhir 2022.

Dinas Pendidikan DKI Pastikan Cabut KJP Plus Siswa Perokok

Tindakan ini sebagai pembelajaran, karena kita harus memberikan edukasi kepada siswa. Salah satunya, sanksi sementara KJP-nya dicabut karena sudah tidak sejalan dengan tujuan awal dan masih ada orang lain yang membutuhkan, kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat.

ayam, ikan, telur dan lain-lain.

"Jadi, kita bisa lihat, jika kemudian dalam rangka edukasi bisa dicabut dalam satu periode (6 bulan). Kemudian setelah ini (siswa dapat) memperbaiki diri, perlakunya, maka tidak menutup kemungkinan akan diaktifkan kembali pada periode berikutnya," ujar Syaefuloh.

Adapun terdapat beberapa larangan yang mesti dipatuhi penerima KJP Plus. Larangan tersebut meliputi:

Membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub Merokok.

Menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Melakukan perbuatan asusila/pelecehan bebas/pelecehan seksual.

Terlibat dalam kekerasan/perundungan.

Terlibat tawuran.

Terlibat geng motor/geng sekolah.

Minum minuman keras/

minuman beralkohol.

Terlibat pencurian.

Melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan.

Terlibat perkelahian.

Terlibat mencontek misal.

Membocorkan soal/kunci jawaban.

Terlibat pornoaksi/pornografi.

Menyebarkan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring.

Membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan.

Sering bolos sekolah minimal empat kali dalam satu bulan.

Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal enam kali dalam satu bulan.

Menggunakan/menjaminkan bansos biaya pendidikan dan/atau buku tabungannya kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

Menghabiskan bansos biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan.

Meminjamkan bansos biaya pendidikan kepada pihak manapun.

Nantinya, pemberian sanksi akan dihitung secara kumulatif berdasarkan jumlah pelanggaran yang dilakukan. Adapun, sanksi terdiri dari penarikan dana KJP Plus hingga pemberhentian sesuai rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru

Budi Hartono menegaskan akan menindak tegas pelajar DKI Jakarta yang kedapatan merokok. Salah satunya dengan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi pelajar perokok.

Sementara Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tak setuju dengan kebijakan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi siswa yang kedapatan melakukan tawuran atau merokok.

Iman Satria mengingatkan adanya konsekuensi dari kebijakan tersebut, khususnya kepada warga kurang mampu yang ingin agar anaknya bisa mengenyam bangku pendidikan.

Ia berharap lebih mengedepankan upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan guru dan orang tua. "Ya pembinaan secara kerohanian lah, ditanya sebab-sebabnya kenapa. Ada konseling di sekolah supaya mereka tahu permasalahannya," kata dia.

Sekadar informasi, untuk KJP Plus, besaran dana yang diterima bagi siswa SD/MI sebesar Rp 250 ribu, SMP/MTs Rp 300 ribu dan SMA/MA sebesar Rp 420 ribu.

Sementara bagi siswa SMK sebesar Rp 450 ribu dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebesar Rp300 ribu.

Adapun total penerima KJP Plus berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta pada awal Maret 2023 ialah sebanyak 803.121 siswa, berasal dari sekolah negeri dan swasta. ● yan

Perbaikan Jalan di DKI untuk KTT ASEAN Dinilai Belum Maksimal

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta menilai perbaikan jalan jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 belum maksimal karena penanganan jalan protokol baru saja dialihkan dari pusat ke Pemprov DKI.

"Akhirnya tahun ini kita butuh anggaran lebih dikarenakan perbaikan maupun penataannya tingkat nasional. Jadi, sekarang ke kita. Jadi berbicara, apakah kita maksimal atau belum, tentu ya belum," kata Ketua Komisi D DKI Jakarta, Ida Mahmudah, saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Kekurangan anggaran tersebut membuat pengerjaan perbaikan jalan di beberapa titik belum maksimal. Walau demikian, dia be-

lum bisa menjelaskan secara detail berapa nilai anggaran yang diajukan Pemprov DKI Jakarta.

Ida juga tidak merinci berapa anggaran yang dibutuhkan Pemprov DKI Jakarta untuk perbaikan ruas jalan tersebut.

Untuk mempercepat pengerjaan jalan di tengah kendala tersebut, Ida mengimbau Dinas Bina Marga untuk meningkatkan inisiatif dalam mengerjakan perbaikan aspal rusak di jalan protokol milik Pemprov DKI Jakarta.

"Saya minta anak buah Plt Kadis Bina Marga untuk perintah anak buah tingkat kecamatan atau Sudin untuk tidak perlu menunggu laporan atau keluhan dari masyarakat yang memang jalan berlubang," kata dia.

Sebelumnya, Penjabat

(Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan akan fokus memperbaiki 14 ruas jalan nasional di Jakarta menjelang KTT ASEAN 2023.

"Jadi, kan ada yang 14 ruas jalan nasional yang pada tahun anggaran 2012 diserahkan ke Pemda DKI, ya itu harus kita rawat. Terutama tentunya untuk menyambut KTT ASEAN," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (9/5).

Selain itu, Heru menyampaikan bahwa sampai saat ini beberapa ruas jalan protokol dari total 14 ruas jalan itu sudah diperbaiki jelang KTT ASEAN.

"Cawang kan sudah. Terus kemarin, saya lihat tadi pagi di mana ya, di Pesing. Nanti saya ke ujung-ujung Jakarta saya lihat," kata dia. ● yan



PEMBUATAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU 2024

Pekerja menyelesaikan pembuatan alat peraga kampanye politik di industri rumahan Pak Sakun, Bukit Duri, Jakarta, Selasa (16/5). Industri rumahan tersebut mulai menerima pesanan alat peraga kampanye seperti bendera partai politik untuk pemilu 2024 dengan jumlah produksi mencapai 2.000 lembar bendera per hari.

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) juncto ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dengan ini Direksi dan PT Gapura Trans Nusa, berkedudukan di Jakarta Selatan ("PT GTN") dan PT Sarana Bumi Permai, berkedudukan di Jakarta Pusat ("PT SBP"), dengan ini memberitahukan bahwa akan dilakukan pengambilalihan terhadap PT GTN dengan cara pengalihan saham sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) kepada PT SBP yang akan menyebabkan terjadinya perubahan kendali dalam PT GTN. Pengambilalihan saham tersebut merupakan pengambilalihan langsung dari pemegang saham PT GTN.

Setiap keberatan dari para pihak yang berkepentingan maupun kreditor atas rencana pengambilalihan tersebut diatas, harus diajukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang sah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini, ke alamat berikut ini:

Grand Panglima Polim Unit 83, Jalan Panglima Polim Kavling 65-66, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160

UP: Direksi

Jakarta, 17 Mei 2023

Direksi
PT Gapura Trans Nusa
PT Sarana Bumi Permai